Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Adi Riyanto

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : adiriyanto@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out what regulations are applied among Civil Servants (PNS) regarding Divorce and to find out the causes of Divorce among Civil Servants (PNS). The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are Regulations on divorce and polygamy regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants; Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline Regulation of Civil Servants. Factors that influence divorce are Education, Age of Marriage, Income, Economic Issues, Domestic Violence, Infidelity, Interference of Large Families (Parents).

Keywords: ethics; law; divorce; pologamy; government employees

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang diterapkan kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengenai Perceraian dan untuk mengetahui penyebab terjadinya Perceraian kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Pengaturan mengenai perceraian dan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah Pendidikan, Lama Usia Perkawinan, Pendapatan , Masalah Ekonomi ,Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perselingkuhan, Campur Tangan Keluarga Besar (Orang Tua).

Kata Kunci : etika; hukum; perceraian; pologami; pegawai negeri sipil

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan didasarkan pada hubungan serta ikatan batin antara pria dan wanita sebagai calon mempelainya. Ikatan batin itu diharapkan akan menjadi pondasi bagi keutuhan perkawinan agar bisa berlangsung selamalamanya, karena Undang-Undang Perkawinan menganut Asas Monogami yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan sekali dalam hidupnya, yang semata-

¹ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, PT RajaGrafindo, hlm.42

mata dilakukan untuk mencapai ridho Tuhan dan membentuk keluarga yang bahagia.² Dalam suatu ikatan perkawinan terdapat pula hak-hak dan kewajiban, baik itu kewajiban suami maupun kewajiban istri. Dengan adanya suatu kewajiban tersebut maka saling timbal balik antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia akan melangsungkan keturunan dan mencapai kebahagiaan hidup yang dicita-citakan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warohma.

Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan Agama atau Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan salah satu unsur aparat negara, yang memiliki wewenang untuk mengabdikan pada negara dan sebagai abdi masyarakat. Makna profesi yang melekat adalah sesuatu luhur dan mulia serta memiliki tanggung jawab social pada profesi yang diembannya.⁴ Upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni dengan melakukan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan melalui reformasi administrasi kepegawaian. Sebagai abdi masyarakat, maka setiap Pegawai Negeri Sipil harus selalu memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan dari tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara.⁵ Seorang PNS dituntut mampu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi sebuah masalah baik informal maupun formal (di keluarga maupun dalam pekerjaan). Dalam fakta yang ditemukan di lapangan adalah besarnya angka perceraian yang diajukan istri terhadap suami atau gugat cerai. Tinggi rendahnya tingkat perceraian di suatu tempat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat tersebut dan sebagian besar dari data yang diperoleh oleh penulis banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai dan yang didominasi oleh para kaum wanita (istri) yang menggugat cerai suaminya dengan alasan tidak ada lagi kecocokan. Seolah mengurangnya nilai pernikahan di mata wanita sehingga mudah saja seorang istri mengajukan gugat cerai. Mereka sadar bahwa di dalam

² Siti Maghfiroh, Indri Fogar Susilowati, implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46 / puu-viii/ 2010 terhadap tunjangan anak luar kawin pegawai negeri sipil, *Jurnal Ilmu Hukum Unesa*, Vol. 1, No. 1 (2019)

³ Mohd Idrus Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 2

⁴ Abdul Choliq Dahlan, Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011

⁵ Prihatin Effendi, Netralisasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 2, Desember 2016

perceraian yang banyak di rugika adalah pihak wanita, namun hal tersebut tak lagi menjadi persoalan bagi mereka yang ingin mengajukan gugat cerai kepada suaminya yang di latar belakang oleh beberapa faktor.

Masalah ini menarik untuk dibahas lebih lanjut karena adanya kontradiksi antara pemikiran secara teoritis dengan gejala sebenarnya yang ada dalam masyarakat. Secara teoritis faktor pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengukur status sosial ekonomi seseorang golongan menengah diharapkan memiliki pemikiran yang luas, tidak terbatas pada kehidupan keluarga saja. Mereka berani memperjuangkan sesuatu yang di anggap perlu di perjuangkan. Karena termasuk orang yang berpendidikan, juga harus berani mempertahankan harga dirinya. Berani menentukan pilihan kehidupan yang sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya, sehingga dapat berkembang dengan baik. Selain kelas menengah harus berani melakukan sesuatu, diharapkan pula mereka mempunyai inisiatifinisif tertentu, sehingga mereka menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Setelah kita tahu bagaimana latar belakang yang sudah di jelaskan oleh penyusun maka kita mendapatkan beberapa pokok permasalahan yang patut kita telaah lebih jauh lagi diteliti lebih rinci, yaitu sebagai berikut: Bagaimana peraturan-peraturan yang tertuang dalam undang-undang tentang poligami ditinjau dari kasus pernikahan secara diam-diam (Siri) yang banyak terjadi dikalangan PNS yang berujung perceraian? Apa saja Penyebab terjadinya pegawai negeri sipil (PNS) Menyalahi kode etik kepegawaian (Perceraian/Poligami)?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Poligami Berdasarkan Peraturan Perundang-undnagan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa jika seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan isteri/isteri-isterinya tidak diperlukan jika isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau

apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Jadi secara umum, jika suami ingin bepoligami harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya persetujuan isteri. Tetapi bagi PNS, ada peraturan khusus lagi yang mengatur mengenai poligami.

Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 adalah salah satu upaya hukum Negara untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS. Ijin untuk mengajukan perceraian selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada pejabat atasan sesuai hirarkinya. Pejabat pemberi izin yang dimaksud adalah Gubernur dan wakilnya, Bupati / walikota atau wakilnya, atau pejabat lain yang ditentukan Undang-undang. Dalam memperoleh ikatan perkawinan itu di perlukan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri secara timbal balik. W Goode mengatakan bahwa cinta tetap penting dalam pembentukan perkawinan. Perasaan cinta dapat mempengaruhi dalam struktur social.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Inti dari arti penegakan Hukum, secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan memepertahankan ketertiban.⁶ Menurut Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat untuk beristri lebih dari seorang, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan PNS tersebut, menunjukkan bahwa PNS merupakan tulang

⁶ Frence M. Wantu, Mewujudkan kapastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012

pungggung bangsa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta melaksanakan birokrasi untuk melayani masyarakat. Kedudukan yang strategis ini diperlukan adanya PNS yang profesional.⁷ Hukuman disiplin berat itu dapat berupa:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, termasuk juga pegawai bulanan disamping pensiun, pegawai bank milik negara, pegawai badan milik negara, pegawai bank milik daerah, pegawai badan usaha milik daerah, dan kepala desa, perangkat desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.

Dengan mengabaikan laporan ketika sudah menikah lagi itu menyalahi arti dari profesi itu sendiri yaitu profesi merupakan struktur pengertian yang di dalamnya mencakup beberapa butir, yaitu bahwa profesi pada hakikatnya merupakan jenis tugas, pekerjaan, jabatan, dan ada pula yang mengatakan *occupation, area of activity*.⁸

B. Faktor-faktor Pegawai Negeri Sipil Bercerai

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian :

Pendidikan

Tinggi rendahnya pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap cara berfikir seseorang baik dalam mengambil keputusan maupun dalam mengatasi emosi dan egonya, maka tidak dipungkiri lagi bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pendidikan formal yang diperoleh dari bangku sekolah. Sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis yang mengambil subyek penilitianya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentunya memiliki pendidikan dan wawasan yang luas maka dengan pendidikan yang mereka miliki membuat mereka berani untuk mengambil sikap termasuk dalam hal menentukan arah kehidupan rumah tangganya. Pengetahuan adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subjek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subjek tertentu. Wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang paling benar.⁹ Oleh sebab itu pendidikan berpengaruh sangat besar.

⁷ Sri Hartini, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 September 2009

⁸ Edy Topo Ashari, memahami karakteristik pegawai negeri sipil yang professional *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* VOL. 4, No.2, November 2010

⁹ Hanik Fitriani, pemahaman pns lulusan pondok pesantren tentang zakat profesi dalam perspektif sosiologi pengetahuan, *Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren* Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016

a. Lama Usia Perkawinan

Lama usia pernikahan yang di jalani juga menentukan kedekatan dan pemahaman karakter pada masing-masing pasangannya, jadi semakin lama usia perkawinan maka semakin banyak pertimbangan-pertimbangan yang di lakukan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perceraian tersebut. Karena menimbang sudah lamanya mereka menjalin hubungan berkeluarga dan dampaknya pada anak. Tapi sepertinya tidak pada penelitian yang di lakukan oleh penulis karena banyak pasangan suami istri yang sudah lama menikah tetap saja memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang sudah lama mereka jalani.

b. Pendapatan

Pendapatan merupakan aspek terpenting dalam menunjang kehidupan berumah tangga. Dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan di dalam keluarga tersebut, baik untuk kepentingan rumah tangga sehari-hari maupun pendidikan anak yang semakin lama semakin meningkat biaya yang di perlukan, sehingga menuntut seseorang agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Gaji merupakan pemberian pem-bayaran finansial kepada pegawai sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan sebagai motivasi atas segala pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang.¹⁰ Kerjasama suami dan istri dalam rumah tangga sangat lah penting. Sesuai dengan penelitian yang di ambil oleh penulis dimana responden dalam penelitian ini adalah seorang guru SD (PNS) yang memiliki gaji tetap dari pemerintah yang di tentukan oleh golongan. Jumlah Anak

Jumlah anak berpengaruh terhadap kebutuhan matreil yang di keluarkan untuk pendidikan dan kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan ini tentu menjadi beban bagi seorang janda yang tinggal sendiri sebagai seorang janda yang tidak memiliki kepala keluarga sebagai penopang hidupmereka sehingga kebutuhan tersebut harus mereka penuhi sendiri dengan terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Sistem pemerintah tentang keluarga berencana atau keluarga ideal. Sehingga dengan demikian maka jumlh tanggungan responden yang menjadi janda tidak begitu berat dan ini merupakan alasan mereka menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan anaknya tanpa bantuan suami.

c. Masalah Ekonomi

Dalam penelitian ini sangat jelas bahwa istri memiliki pekerjaan yang mapan dengan menyandang pekerjaan sebagai PNS dan tidak sedikit suami yang memiliki penghasilan dibawah pengasilan istri. Membuat istri tidak terlalu menggantungkan masalah ekonomi keluarga terhadap suami, sehingga dominasi suami terhadap istri secara ekonomi melemah. Hal ini membuat seorang wanita merasa tidak selamanya seorang istri berada dibawah, mereka juga ingin diperlakukan sebagaimana seorang yang memberikan andil dalam keluarganya dan menentukan nasibnya. Apalagi penghasilan istri yang lebih tinggi di bandingkan oleh suaminya. Kepemerintahan yang baik atau good governance menunjukkan suatu proses di mana masyarakat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber sumber

¹⁰ Ajib Rakhmawanto, Strategi Perbaikan Penghasilan Pns: Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalitas, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, VOL. 6, No.2, November 2012

sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.¹¹

Berikut Studi Kasus yang bernama ibu melati:

Ibu merasa di manfaatkan karena ibu seorang PNS di manfaatkan dalam arti suami ibu hanya numpang hidup, baik itu makan,tempat tinggal dan pakaian sampai rokok pun ibu yang harus menaggunnya, sampai perselingkuhan pun menggunakan uang yang di minta dari ibu, hal itu yang buat ibu untuk memutuskan berpisah dengan suami ibu, selama menikah tidak memberikan pengaruh positif terhadap keluarga, misal tidak adanya perhatian terhadap anak-anak ibu juga terhadap ibu, tidak pernah menunjukkan bagaimana suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya tidak memberi nafkah materi selama menikah sampai ibu cerai, malah dia yang selalu meminta kepada ibu baik materi maupun kepuasan batin. Jadi ibu merasa tidak ada manfaatnya mempertahankan kan hubungan pernikahan kalau seperti itu.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap salah satu responden yang memiliki suami yang tidak memiliki pekerjaan, memperjelas bahwa pekerjaan suami dan penghasilan suami sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Goode (1956)** dari 425 wanita yang bercerai yang berada di wilayah Detroit, Amerika Serikat, **Goode** mencoba menghitung indeks kecenderungan terjadinya perceraian dari setatus pekerjaan suami. Bahwa tingkat perceraian yang tertinggi terjadi di kalangan wanita yang suaminya bekerja sebagai buruh atau tenaga kerja kasar yang tidak trampil.

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga pada zaman sekarang ini tidak lagi jarang kita dengar karna semakin banyaknya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang di lakukan oleh salah satu anggota keluarga dan melukai anggota keluarganya yang lain pula karena banyak faktor yang mempengaruhi yang paling banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, karena kedua faktor tersebut sangat erat kaitannya. Karena itu di dalam dunia kerja harus ada yang memotivasi agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, secara harafiah, motivasi bisa dimaknai sebagai aktivitas psikologis yang mendorong seseorang menjadi sangat antusias dan tidak mudah putus asa untuk bertindak dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Seperti yang dialami oleh ibu kasih :

Suami ibu adalah seorang supir angkutan umum yang pernah bekerja di sebuah perusahaan di pekanbaru dan di pecat arena perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada saat suami ibu masih sebagai kariawan hidup kami masih serba kecukupan dan hubungan kami juga baik-baik saja biar pun sedikit ada percekcoakan tetapi masih bisa diatasi tetapi semua berubah ketika suami ibu dipecat dan beralih bekerja menjadi supir ekonomi kami juga menurun sedangkan kebutuhan kami semakin meningkat

¹¹Enceng, Liestyodono BI, Purwaningdyah MW, meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 2, No.1, Juni 2008

¹² Erwan Agus Purwanto, Meninjau Kembali Remunerasi Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Profesionalisme Pns: Perspektif Teori Motivasi Internal Dan Eksternal ,*Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* VOL. 4, No.2, November 2010

dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di rumahpun semakin sering terjadi dan sulit untuk di atasi karena emosi mantan suami ibu pada saat itu sangat tidak stabil mungkin di pengaruhi oleh masalah pemecatan dan pekerjaan dia pada saat itu dan semakin lama suami ibu sudah mulai berani berbuat kasar dengan ibu bahkan tak jarang suami ibu tega memukul dan berbuat kasar kepada ibu ketika bertengkar, permasalahan yang sering menjadi pemicu pertengkaran tak jarang masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain yang sebenarnya tak penting bisa menjadi pemicu terjadinya pertengkaran. Karena sudah merasa tidak tahan akhirnya ibu memutuskan untuk menggugat cerai suami ibu, ibu berfikir kalau seandainya masih terus di pertahankan yang ada ibu dan anak-anak ibu terus tersakiti karena kelakuannya.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga memang tidak lagi bisa di tolerir dan banyak kasus perceraian karena kekerasan rumah tangga yang umumnya di lakukan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya.

e. Perselingkuhan

Kasus perceraian yang ditemukan karena kesibukan suami yang lebih sering berada di luar rumah di bandingkan di rumah, sehingga intensitas pertemuan mereka yang jarang. Belum lagi pengaruh dari lingkungan mereka kerja.

Hal ini membuat hubungan dalam suami-istri menjadi renggang dan kurang mendapat kesempatan untuk memelihara keharmonisan dalam rumah tangga.

Studi kasus yang bernama ibu Ani yang berusia 30 tahun dan memiliki satu orang anak laki-laki yang baru berusia 4 tahun dan mantan suaminya bekerja sebagai swastawan di sebuah perusahaan di pekan baru.

Perselingkuhan itu terjadi ketika suami ibu sering ditugaskan keluar kota untuk bebrapa urusan dan setelah itu suami ibu mulai jarang pulang kerumah. Sehingga suami ibu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dan jarang berada dirumahdan mungkin itu salah satu faktor penyebabnya mengapa ia berselingkuh, kemudian hal itu pernah ibu ketahui dan dia meminta ma'af kepada ibu dengan penuh pertimbangan ibu masih bisa memberi ma'af meski berat dan merasa tersakiti ibu coba untuk berlapang hati mema'afkan dan sampai akhirnya dia berbuat untuk kedua kalinya dan itu dia lakukan dengan teman sekantornya yang juga sudah memiliki suami, hal itu tidak lagi bisa ibu ma'afkan ibu merasa tidak ada lagi kesempatan kedua untuk suami ibu karena jika ibu ma'afkan hal yang serupa pasti akan terjadi karena dia merasa pasti ibu ma'afkan. Dan akhirnya ibu memutuskan untuk menggugat cerai suami ibu.

Sesuai dengan pernyataan di atas maka jelas bahwa banyak wanita yang merasa di rugikan dan di tersakiti karena perselingkuhan yang lebih banyak di lakukan oleh lelaki. Dan karena kesadaran atas haknya maka wanita tidak lagi mau untuk ditindas terus diatur dengan menerima segala perlakuan suami dan salah satu wujud emansipasi wanita yang mereka lakukan dengan cara membebaskan diri dari lelaki yang tidak lagi menghargai wanita dengan cara menggugat cerai.

f. Campur Tangan Keluarga Besar (Orang Tua)

Campur tangan orang tua sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga seorang anak yang telah memiliki keluarga baru. Ikut campur orang tua biasanya lebih jelas karena pasangan suami istri yang baru menikah tinggal bersama dengan orang tuanya.

. Seperti yang di kemukakan oleh **G. Triadi** berikut ini :

1. Budaya adalah patriaki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk imperior.
2. Pemahaman yang keliru tentang ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
3. Perilaku anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga memang tidak lagi bisa di tolerir dan banyak kasus perceraian karena kekerasan rumah tangga yang umumnya di lakukan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya.

C. Studi Kasus Pegawai Negeri Sipil Pernikahan secara diam-diam (Siri)

Istri seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, melaporkan suaminya yang telah berpoligami secara siri kepada pihak Inspektorat setempat. Kepala Kantor Inspektorat Pemkab Jembrana, Ketut Arimbawa, di Negara, Rabu, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan atas dugaan poligami yang dilakukan PNS berinisial HN. Menurut dia, HN pernah mendapatkan sanksi penurunan pangkat karena kedapatan berselingkuh pada Maret 2010. "Selain itu, dia dipindahkan tugasnya dari Kantor Lurah Loloan Timur ke Kantor Camat Melaya," kata Arimbawa mengungkapkan. Untuk pemeriksaan HN, dia memastikan akan dilakukan pada awal bulan Desember karena saat ini personel Inspektorat masih sibuk dengan tugasnya masing-masing.

Meskipun saat ini rumah tangga HN dan istrinya yang juga berstatus PNS sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Arimbawa menegaskan, pihaknya akan berpegang pada bukti-bukti bahwa mereka belum bercerai. "Perceraian mereka belum ada kekuatan hukum pasti sampai saat ini. Jadi, keduanya tetap harus mematuhi aturan kepegawaian, termasuk terkait nikah lagi," ujarnya. Menurut dia, permohonan cerai yang diajukan oleh HN belum mendapatkan izin dari Bupati Jembrana selaku pejabat pembina PNS. Hingga kini pun belum ada kekuatan hukum tetap dari pihak pengadilan. Arimbawa mengungkapkan bahwa proses perpisahan HN dan istrinya baru sebatas surat talak I. Perceraian itu dilandasi atas tidak adanya cinta lagi, apalagi HN menganggap istrinya sering kali membangkang. "Dalam kasus ini kami tetap menganggap oknum PNS itu selingkuh karena tidak ada dalam aturan yang soal nikah siri," ujar Arimbawa.

Jika terbukti, Arimbawa memastikan, hukuman yang akan diterima HN ini akan lebih berat karena sudah pernah kena kasus yang sama sebelumnya. Sementara itu, HN yang dikonfirmasi wartawan membantah bahwa dirinya telah menikah siri dengan perempuan lain.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai perceraian dan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah Pendidikan, Lama Usia Perkawinan, Pendapatan, Masalah Ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perselingkuhan, Campur Tangan Keluarga Besar (Orang Tua). Kondisi terakhir ini, kembali menempatkan teori interaksionisme simbolik pada *maqamnya* yang terpenting. Yaitu, ketika sisi pragmatisme yang muncul dengan wajah permasalahan ekonomi keluarga secara nyata tidak hanya berhasil memengaruhi sisi personalitas masing masing anggota keluarga untuk saling pandang dalam kacamata yang materialistis, namun juga pada level struktur masyarakat yang diputus derajat kepercayaannya, hingga pada status nirwibawa.

Simbol kewibawaan dan kesakralan yang semula melekat pada lembaga perkawinan secara bertahap pun semakin tergerus. Ketergerusan ini secara tidak langsung terpotret dari semakin mudarnya fungsi-fungsi struktural yang sebelumnya senantiasa menaungi lembaga perkawinan, seperti kehadiran pemuka-pemuka agama atau lembaga-lembaga adat, yang diwakili oleh kalangan *asatidz* dan *lebe'* dalam memberikan *problem solving* atas kasus-kasus permasalahan yang menimpa pasangan di dalam keluarga. Keterangan tentang mudarnya fungsi lembaga adat dan keagamaan yang umumnya menjadi rujukan ragam persoalan keluarga.

SARAN

Saran-saran yang dapat di kemukakan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dalam upaya mempertahankan suatu hubungan suami istri dalam rumah tangga, masing-masing harus lebih memahami arti pernikahan serta aturanaturan dalam pernikahan tersebut serta penimbangan untuk kelangsungan pendidikan dan mental anak.
2. Serta pertimbangan sebelum menikah seharusnya setiap pasangan seharusnya terlebih dahulu mempersiapkan mental dan materi yang akan di perlukan untuk membangun sebuah rumah tangga, karena sebuah rumah tangga sangat memerlukan dukungan ekonomi, kedewasaan, kematangan dan kemampuan menyelesaikan masalah dalam hubungan rumah tangga.
3. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya sebuah rumah tangga yang baru harus memiliki rumah dan kehidupan tersendiri agar mampu mandiri dan lebih leluasa untuk pasangan suami istri saling mengenal lebih jauh.
4. Tanggung jawab orang tua terhadap anak memanglah sangat besar, tetapi ketika seorang anak memiliki keluarga sendiri, sebagai orang tua seharusnya memberikan kebebasan dan kepercayaan terhadap keputusan rumah tangga anaknya, karena ketika seorang anak telah memiliki keluarga kecil yang baru tugas orang tua hanya mengawasi dan memberi nasehat dan pengarahan ke arah lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Choliq Dahlan, Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011
- Ajib Rakhmawanto, Strategi Perbaikan Penghasilan Pns: Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalitas, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, VOL. 6, No.2, November 2012
- Depertemen Agama RI. *Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4)*. Pusat Jakarta, Juni 1995
- Diding Rahmat. *Problematika Geng Motor Di Kabupaten Kuningan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum*. ISSN 2354-5976 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2014, hlm. 45-78.
- Edy Topo Ashari, memahami karakteristik pegawai negeri sipil yang professional *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 4, No.2, November 2010*
- Enceng, Liestyodono BI, Purwaningdyah MW, meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 2, No.1, Juni 2008
- Erwan Agus Purwanto, Meninjau Kembali Remunerasi Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Profesionalisme Pns: Perspektif Teori Motivasi Internal Dan Eksternal, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 4, No.2, November 2010*
- Frence M. Wantu, Mewujudkan kapastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012
- Hanik Fitriani, pemahaman pns lulusan pondok pesantren tentang zakat profesi dalam perspektif sosiologi pengetahuan, *Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren* Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016
- Mohd Idrus Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 2
- Prihatin Effendi, Netralisasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 2, Desember 2016
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, PT RajaGrafindo, hlmn 42
- Sekhroni, Sekhroni. *Criminal Liability dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Unifikasi. ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. Kuningan : FH UNIKU.
- Siti Maghfiroh, Indri Fogar Susilowati, implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46 / puu-viii/ 2010 terhadap tunjangan anak luar kawin pegawai negeri sipil, *Jurnal Ilmu Hukum Unesa*, Vol 1, No 1 (2019)
- Sri Hartini, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 September 2009
- Sekhroni, Sekhroni. *Criminal Liability dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Unifikasi. ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. Kuningan : FH UNIKU.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil